

ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2012-2016

YENNY NOVIANTY OEIY
MEDINAL
ARKA'A AHMAD AGIN

Accounting Program
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e-jurnal@stie-ibek.ac.id

This study aims to determine the effect of Motor Vehicle Tax and Motorcycle Vehicle ownership reverse cost Title to the Local Revenue of Bangka Belitung Islands Province. The result of the research shows that the variable of Motor Vehicle Tax has an effect on the original income of the region, in the form of Motorcycle Vehicle ownership reverse cost, does not affect the local revenue. Based on the results simultaneously using Test F and it is found that the value of F_{hitung} of 34.230 > F_{tabel} 19,00, where there is influence between the Motor Vehicle Tax and Motorcycle Vehicle ownership reverse cost to the Local Revenue. In partial result using T Test, the comparison between t_{hitung} and t_{table} for Motor Vehicle Tax shows t_{hitung} is bigger than t_{table} ($6,044 > 4,30265$) means that Motor Vehicle Tax shows significant influence to Local Revenue. Also on result Comparison between t_{hitung} and t_{table} for debt level show t_{hitung} is smaller than t_{table} ($0,481 < 4,30265$) means Motor vehicle reverse cost reveals insignificant influence to Local Revenue.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Charge, Local Original Revenue

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah perlu merealisasikan pembangunan daerah yang merata disegala tempat dan tentunya membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengelola sumber daya yang ada. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mendanai dan membiayai penyelenggaraan otonomi daerah bisa berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas maupun non migas dan ketersediaan dana daerah salah satunya sektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling potensial bagi dana pembangunan, karena jumlahnya meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar. Dalam kata lain pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Mulyadi (2013) menyatakan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Selaras dengan pendapat Mulyadi. Ciri-ciri pajak daerah menurut Ismail dalam Candra (2016) yaitu: pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, artinya penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya, relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, *tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah. Definisi dari pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralis Prasetya (2016).

Pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. Jenis pajak dan retribusi menurut UU No 28 Tahun 2009 dikelola dalam dua jenis pajak, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk pajak daerah untuk provinsi adalah: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan yang termasuk pajak daerah untuk kabupaten/kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan pengertian sehubungan dengan bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah merupakan wewenang dan tanggung jawab Badan Keuangan Daerah (Bakuda) atau biro keuangan pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup cepat, salah satunya perkembangan transportasi. Dari tahun ke tahun perkembangan transportasi Bangka Belitung terus bertambah. Kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu objek dari penerimaan pajak daerah. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor disuatu daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka pemenuhan pendapatan pajak daerahnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Bangka Belitung.

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai *the process that aids these decisions by (1) recording, (2) classifying, (3) summarizing, and (4) reporting business transactions and enterpreting their effect on the affairs of the business entity*. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan informasi ekonomi suatu perusahaan dan menafsirkan informasi keuangan tersebut untuk mengambil keputusan bisnis sebuah perusahaan, Toto (2013).

Pengertian Pajak

Sukardji dalam Siska (2017) mengemukakan pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo (2016) yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2016) fungsi pajak dapat dibedakan atas dua yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai-membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan Bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan Bermotor. Darwin (2010).

Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2013) Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yang seterusnya disebut BBNKB memiliki arti, yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak

atas penyerahan hak milik kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar-menubar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Samudra (2015) penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
- b. Untuk diperdagangkan
- c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia
- d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional

Pengertian Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

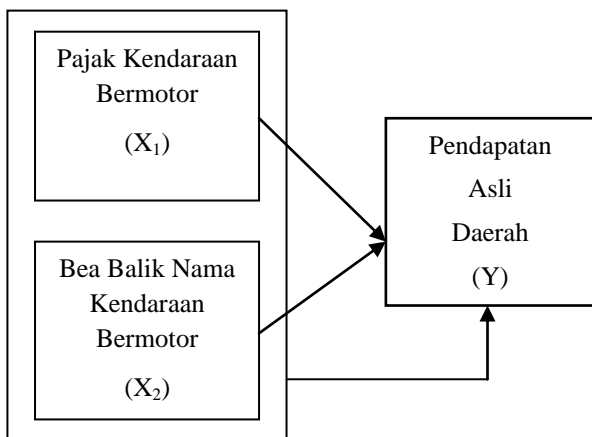
Samudra (2015) sumber pendapatan meliputi tidak saja pendapatan asli daerah, akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pengertian dalam arti sempit. Jadi jelas berbeda dengan pengertian sumber pendapatan daerah (secara global). Sebab dari semua sumber-sumber pendapatan hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, dari retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu alur pemikiran yang dijadikan sebagai acuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diteliti secara logis dan sistematis.

Gambar I
Kerangka Berpikir



Hipotesis

Berdasarkan pemikiran teoritis dan peninjauan terhadap penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H₀: Diduga Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung.
- H₁: Diduga Pajak Kendaraan Bermotor Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung.
- H₀: Diduga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung.
- H₂: Diduga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung.
- H₀: Diduga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung.
- H₃: Diduga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung

III. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berlokasi di Jl. Pulau Belitung No. 4 Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi.

Variabel yang Diteliti

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi variabel terikat dan variabel bebas :

1. Variabel terikat (*dependent variabel*)
Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah pendapatan asli daerah yang akan diukur dengan menggunakan nominal.
2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)
Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan menggunakan nominal.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Populasi yaitu data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Sampel yaitu data pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah yang berada di Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2012 hingga 2016.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan teknik analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penulisan

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder ini dapat berupa tabel, diagram, bukti, catatan, ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat terbebas dari bias sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Hal ini dapat dari analisis grafik yang menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Artinya jika data yang berupa titik-titik dalam grafik menyebar di sekitar garis dan mengikut garis diagonal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas atau lulus uji normalitas data.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

1. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0,9, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
2. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* mendekati 1 serta $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi merupakan suatu kajian terhadap pengaruh satu variabel yang disebut sebagai variabel terikat dengan satu atau dua variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi menggunakan regresi linier berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel terikat. Regresi Berganda dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar variabel dalam penelitian tersebut saling mempengaruhi. Rumus yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b^1 X^1 + b^2 X^2 + e$$

Dimana:

- Y = Pendapatan Asli Daerah
 a = Konstanta
 b = Koefisien Regresi Variabel
 X^1 = Pajak Kendaraan Bermotor
 X^2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 e = error

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) terhadap variabel dependen (Y). Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika R^2 sama dengan atau mendekati 0, maka presentase pengaruhnya kecil atau tidak ada sama sekali, sebaliknya apabila R^2 mendekati atau sama dengan 1 maka pengaruh yang diberikan variabel independen sangat besar.

Berdasarkan hal tersebut maka koefisien determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Kd \% = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd % = Koefisien determinasi dalam persentase

R^2 = Koefisien determinasi hasil pengolahan data

Pengujian Hipotesis

1. Uji t Statistik

Uji hipotesis penelitian dalam penelitian ini menggunakan uji t yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masing-masing dinyatakan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah jika probabilitas level analisis regresinya $< 0,05$. Begitu pula sebaliknya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masing-masing dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah jika probabilitas level analisis regresinya $> 0,05$.

2. Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bersama-sama atau secara simultan dapat berpengaruh terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor variabel dependen.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah jika probabilitas level analisis regresinya $< 0,05$. Begitu pula sebaliknya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah jika probabilitas level analisis regresinya $> 0,05$.

IV. PEMBAHASAN

Analisis Perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang ikut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
Perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah kendaraan (Unit)		Target (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Persentase Pencapaian
2012	R2	325.158	126.682.838.314,62	130.791.945.501,00	103.24
	R4	55.622			
2013	R2	333.866	151.034.970.754,20	149.719.572.524,00	99.13
	R4	63.043			
2014	R2	322.178	155.769.428.882,00	162.036.291.096,00	104.02
	R4	66.770			
2015	R2	325.404	157.552.961.226,00	172.235.506.387,00	109.32
	R4	72.632			
2016	R2	307.609	166.398.049.142,00	171.879.396.152,00	103.29
	R4	73.600			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dilihat dari tabel tersebut jumlah kendaraan bermotor untuk roda dua tiap tahunnya berfluktuatif sedangkan untuk jumlah kendaraan roda empat meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 persentase pencapaian pajak kendaraan bermotor mencapai 103,24% dengan nilai Rp 130.791.945.501,00 artinya, realisasi penerimaan pajak melebihi target sebesar 3,24% atau sebesar Rp 4.109.107.186,38 dengan jumlah kendaraan roda dua sebesar 325.158 unit dan kendaraan roda empat sebesar 55.622 unit. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan roda dua bertambah, menjadi sebesar 333.866 unit dan kendaraan roda empat bertambah, menjadi sebanyak 63.043 unit dengan target pajak kendaraan bermotor senilai Rp 151.034.970.754,20. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 sebesar Rp 149.719.572.524,00 atau sebesar 99,13% artinya, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 tidak mencapai target atau *under target*. Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah kendaraan bermotor roda dua sebesar 322.178 unit dan kendaraan bermotor roda empat sebesar 66.770 unit. Persentase pencapaian sebesar 104,02% dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor senilai Rp 162.036.291.096,00. Artinya, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2014 meningkat senilai Rp 12.316.718.572 dari tahun 2013.

Persentase pencapaian terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 109,32% atau melebihi target sebesar Rp 14.682.545.161. Dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor senilai Rp 172.235.506.387,00 artinya pada tahun tersebut pajak kendaraan bermotor terealisasi cukup besar dari pada yang dianggarkan dengan jumlah kendaraan roda dua sebesar 325.404 unit dan jumlah kendaraan roda empat sebesar 72.632 unit. Dengan kata lain, realisasi pajak kendaraan bermotor 9,32% lebih besar pencapaiannya dari pada target yang ditetapkan.

Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2016 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali mengalami penurunan sebesar Rp 356.110.235 sehingga realisasi penerimaan pajak tahun 2016 senilai Rp 171.879.396.152,00 dengan persentase pencapaian sebesar 103,29%. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah kendaraan bermotor untuk roda dua yaitu sebanyak 17.795 unit, sehingga tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor roda dua sebesar 307.609 unit, akan tetapi penerimaan tersebut tetap melebihi target yang telah ditetapkan dengan presentase 103,29% dengan didominasi kendaraan roda dua sebanyak 307.609 unit.

Analisis Perkembangan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2
Perkembangan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah kendaraan (Unit)		Target (Rp)	Realisasi BBNKB (Rp)	Persentase Pencapaian
2012	R2	325.158	137.661.026.206,19	140.652.956.714,00	102.17
	R4	55.622			
2013	R2	333.866	143.964.317.500,00	154.884.483.572,00	107.59
	R4	63.043			
2014	R2	322.178	134.458.011.317,00	139.175.293.731,00	103.51
	R4	66.770			
2015	R2	325.404	118.085.668.781,00	110.239.082.050,00	93.36
	R4	72.632			
2016	R2	307.609	99.652.130.300,00	111.656.778.500,00	112.05
	R4	73.600			

Tabel 2 menunjukkan perkembangan realisasi bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang berfluktuatif. Fluktuatif adalah kondisi/keadaan yang tidak stabil, yang menunjukan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Pada beberapa tahun terakhir ada beberapa tahun yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Peningkatan maupun penurunan tersebut dapat terjadi dengan berbagai faktor tergantung dengan situasi yang terjadi selama tahun tersebut.

Pada tahun 2012 realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki nilai Rp 140.652.956.714 dengan persentase pencapaian sebesar 102,17% yang artinya melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2,17% dan masih sama yaitu didominasi kendaraan roda dua sebanyak 325.158 unit kendaraan.

Penerimaan Pemerintah Povinsi Bangka Belitung dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor sepanjang tahun 2013 mencapai Rp 154.884.483.572,00 dari sekitar 333.866 objek kendaraan bermotor roda dua dan 63.043

kendaraan bermotor roda empat. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 140.652.956.714,00. Artinya pencapaian tahun ini meningkat antara 5%-6% dari tahun lalu.

Pada tahun 2014 realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor menurun menjadi Rp 139.175.293.731,00. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah memasang target realisasi penerimaan lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengurangan biaya bea balik nama unit kendaraan di luar Provinsi Bangka Belitung. Pengurangan bea balik nama kendaraan pelat luar atau nomor polisi luar daerah sekitar 50% dari biaya semestinya dan bebas sanksi administratif. Pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut menindaklanjuti surat edaran DPPKAD Provinsi Bangka Belitung Tanggal 3 Oktober 2014 Nomor 973/1909/DPPKAD-Pjk/2014.

Ini juga bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memungut biaya pajak kendaraan luar daerah yang selama ini beroperasi di Provinsi Bangka Belitung tetapi membayar pajak diluar.

Peningkatan maupun penurunan penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor dapat menjadi acuan dalam melihat efektifitas penerimaan pajak tersebut, karena apabila terjadi peningkatan dari tahun ke tahun maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor juga akan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

Setelah itu realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor kembali menurun menjadi sebesar Rp 110.239.082.050,00 pada tahun 2015 tingkat efektifitas yang diperoleh cukup rendah dibandingkan dengan tahun lainnya yang mencapai 100% lebih, yang artinya pada tahun 2015 bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat terealisasi sebesar 93.36% dari target yang telah ditetapkan. Target penerimaan daerah dari sektor bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bangka Belitung pada 2015 sebesar Rp 118.085.668.781,00.

Hal ini dikarenakan adanya pengusulan perubahan target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor karena untuk mengimbangi penerimaan pajak dari sektor lain, sehingga target tersebut dapat tercapai.

Pada tahun 2016 penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor kembali meningkat karena adanya penurunan target penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor, demi mengimbangi penerimaan pajak sektor lain, dengan nilai Rp 111.656.778.500,00 persentase kenaikan sebesar 12.05% dari target seharusnya.

Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung

Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada pendapatana asli daerah yaitu rata-rata sebesar 8.02% retribusi daerah rata-rata sebesar 1.42% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata 0.97%.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Pencapaian
2012	423.107.063.158.62	438.515.468.834,64	103.64
2013	478.877.918.597.58	495.795.084.873,15	103.53
2014	556.742.867.297.83	563.108.840.860,92	101.14
2015	558.971.218.953.54	571.802.890.055,14	102.30
2016	581.397.810.824.26	574.911.410.855,77	98.88

Tabel 3 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan. Pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir memberikan kontribusi pada pendapatan daerah rata-rata hingga tahun 2016 mencapai 31.32%.

Realisasi pendapatan asli daerah tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 574.911.410.855,77 akan tetapi kurang dari target sebesar 98.88% dikarenakan pendapatan yang paling sedikit pada triwulan pertama tahun tersebut dari bea balik nama kendaraan bermotor, karena perekonomian masyarakat yang melesu sehingga berdampak terhadap kurangnya kepatuhan wajib pajak didalam membayarkan kewajibannya. Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun tersebut didominasi oleh pajak kendaraan bermotor. Kemudian realisasi terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 438.515.468.834,64 dengan melebihi persentase pencapaian sebesar 3.64%. Adapun penyebabnya karena pajak daerah tak tercapai, karena penerimaan pajak lain yang belum optimal. Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan asli daerah (PAD) yaitu rata-rata sebesar 89.59% diikuti lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah sebesar 8.02% retribusi daerah rata-rata sebesar 1.42% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata sebesar 0.97%. Keadaan ini menggambarkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rasio derajat otonomi fiskal daerah dikategorikan cukup (30.01% - 40.00%, dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan pendapatan daerah).

Dilihat dari nilai pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2015 yang semakin meningkat dan persentase melebihi target yang telah ditetapkan. Tetapi pada tahun 2016 meskipun mengalami peningkatan, penerimaanya tidak melebihi target dengan persentase 98.88% yaitu 1.12% kurang dari target yang telah ditetapkan.

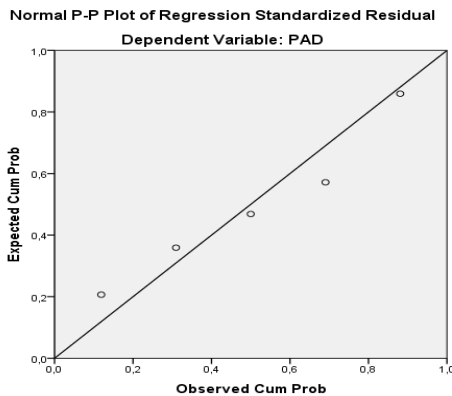
Pajak kendaran bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang cukup besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kisaran antara 26.84% sampai dengan 33.46% diikuti dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor walaupun kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya bervariasi berkisar 30.64% sampai dengan 32.16%. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah sehingga

penerimaan atas pajak kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun walaupun kenaikannya bervariasi dan kenaikan tersebut juga mempengaruhi konsumsi atau keperluan atas bahan bakar kendaraan bermotor yang selalu semakin meningkat dari tahun ke tahun walaupun kenaikannya bervariasi.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normlaitas

Gambar 2
Uji Normalitas



Dapat dilihat pada output regresi diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi tersebut telah normal.

b. Uji Multikolinearitas

TABEL 4
Uji Multikolinearitas
Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PKB	,476	2,103
BBNKB	,476	2,103

Berdasarkan nilai VIF dan *Tolerance* pada table diatas, dapat dilihat bahwa variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka dapat diketahui tidak terdapat variabel yang mengandung multikolinearitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dimana variabel independen yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, didalam mewujudkan variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah, maka akan digunakan persamaan regresi berganda.

Dari tabel diatas persamaan regresi berganda adalah :

TABEL 5
Persamaan Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-69299827208,409	151642319274,866		-,457	,693		
PKB	3,589	,594	1,044	6,044	,026	,476	2,103
BBNKB	,254	,529	,083	,481	,678	,476	2,103

$$Y = -69299827208,409 + 3,589 X_1 + 0,254 X_2$$

0,69 0,026 0,678

- a. Nilai bilangan konstanta sebesar -69299827208,409 berarti jika pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 0 maka pendapatan asli daerah sebesar -69299827208,409. Nilai koefisien regresi X_1 yaitu pajak kendaraan bermotor sebesar 3,589 berarti jika pajak kendaraan bermotor dinaikan 1 satuan, maka pendapatan asli daerah meningkat 3,589 satuan.
- b. Nilai koefisien regresi X_2 yaitu bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 0,254 berarti jika bea balik nama kendaraan bermotor dinaikan 1 satuan, maka pendapatan asli daerah meningkat 0,254 satuan.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

TABEL 6
Analisis Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,986 ^a	,972	,943	14292414507,86738	3,370

$$Kd = (0,972) \times 100\% = 97,2\%$$

Hasil $r^2 = 97,2\%$ yang berarti variabel Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat berperan dalam mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,2% dan sisanya sebesar 2.8 % karena faktor variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis statistik adalah satu kenyataan yang dibuat tentang suatu populasi. Kenyataan ini mungkin benar atau tidak. Kebenaran kenyataan tersebut dibuat menggunakan ujian hipotesis sebagai berikut:

TABEL 7
Pengujian Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-692998,27208,409	151642,319274,866		-,457	,693		
PKB	3,589	,594	1,044	6,044	,026	,476	2,103
BBNKB	,254	,529	,083	,481	,678	,476	2,103

1. Data diatas menunjukkan bahwa nilai untuk Pajak kendaraan Bermotor sebesar 0,026, maka $\alpha < 0,05$ artinya Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan dengan penelitian sebelumnya oleh Bagus Prasetya Pamungkas (2016). Hasil penelitian membuktikan adanya hubungan positif antara Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan Asli Daerah, semakain tinggi Pajak Kendaraan Bermotor maka semakain meningkat Pendapatan Asli Daerah. Artinya penelitian membuktikan penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Hal tersebut karena setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Provinsi Bangka Belitung selalu meningkat sehingga kontribusi pajak kendaraan bermotor yang diperoleh semakain besar jika dibandingkan dengan pajak lainnya. Pertumbuhan pesat jumlah kendaraan bermotor yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung ternyata diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan setiap tahun pemilik motor wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut merupakan penghasilan dari pajak daerah yang ikut serta mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pengaruh yang diberikan dari pajak kendaraan bermotor cukup baik dikarenakan rata-rata mayoritas masyarakat yang tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kendaraan bermotor sehingga pajak kendaraan bermotor selalu meningkat seiring dengan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor.
Berarti hipotesis pertama menyatakan bahwa "Diduga Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung". Tidak dapat diterima.
2. Data diatas menunjukkan bahwa nilai untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 0,678, maka $\alpha > 0,05$ artinya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan peneliti sebelumnya oleh Margaretha, Anton, Christina (2016) yang membuktikan bahwa apabila Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bertambah 1%(asumsi), maka Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan. Hal ini berarti besar kecilnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terjadi karena jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Bangka Belitung cukup tinggi tetapi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah masih terhitung kecil. Sehingga walaupun jumlah kendaraan bermotor yang beredar di jalan banyak namun besarnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tergantung transaksi jual beli motor. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor yang ada selama periode tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa saja terjadi karena masyarakat Provinsi Bangka Belitung lebih memilih membeli kendaraan baru sehingga jumlah kendaraan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan membeli atau membalik nama kendaraan bekas. Seperti yang diungkapkan *web postkotanews* bahwa adanya kecendrungan masyarakat tetap memilih mobil baru dari pada bekas, hal ini disebabkan adanya program penjualan *Low Cost Green Car (LCGC)* atau mobil murah. Web Sumeks juga mengungkapkan bahwa dari 300 showroom di Sumatra Selatan hampir 60-70% mengalami kebangkrutan dan penjualan mobil bekas mengalami penurunan >50%. Hal tersebut juga dipengaruhi dari semakin mudah dan murah nya masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor baru. Berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa "Diduga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung". Dapat diterima.

Uji t Statistik

Pengujian melalui uji t dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$ untuk uji satu sisi atau $t_{table} \alpha = 0,05/2 (0,025)$.

TABEL V.8

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-692998,27208,409	151642,319274,866		-,457	,693		
PKB	3,589	,594	1,044	6,044	,026	,476	2,103
BBNKB	,254	,529	,083	,481	,678	,476	2,103

$$Df = 5 - 2 - 1 = 2$$

$$t_{tabel} (2) = 4,30265$$

- a. Perbandingan antara nilai t_{hitung} dan t_{table} untuk Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{table} ($6,044 > 4,30265$) dan nilai Sig t sebesar $0,026 < 0,05$ artinya Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H_1 diterima.
- b. Perbandingan antara nilai t_{hitung} dan t_{table} untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari t_{table} ($0,481 < 4,30265$) dan nilai Sig t sebesar $0,678 > 0,05$ artinya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka H_2 ditolak.

ketiga menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian dan analisis data serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung. Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 3,589 dengan signifikan 0,026 terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung. Peningkatan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor sebesar 0,254 dengan signifikan 0,678 terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Berdasarkan Uji F dapat dilihat dari F_{hitung} adalah 34,230 dengan F_{tabel} 19,00 artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan signifikansi $0,028 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.
4. Nilai koefisien determinasi R^2 Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangat berperan dalam meningkatkan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 97,2% dan sisanya sebesar 2.8 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji f Statistik

TABEL V.9
Uji Anova (F test)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	13984678515 87780000000 0,000	2	6992339257 9389000000 00,000	34,230	,028 ^b
Residual	40854622492 93960000000,0 00	2	2042731124 6469800000 0,000		
Total	14393224740 80719700000 0,000	4			

Uji F = Uji Simultan

- Df = $n - k - 1$
- Df = *degree of freedom* (derajat bebas)
- n = banyaknya sampel
- k = jumlah variabel *independent* (variabel bebas)

$df = 5 - 2 - 1$
 $df = 2$
 $F_{tabel}(2,2) = 19,00$

Uji ANOVA atau *F test*, dapat dilihat dari F_{hitung} adalah 34,230 dengan F_{tabel} 19,00 artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dengan signifikansi $0,028 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.

Berarti H_0 yang menyatakan bahwa “Diduga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung”. Ditolak dan H_3 yang menyatakan “Diduga Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bangka Belitung”. Diterima

Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya di Provinsi Bangka Belitung yang berkelanjutan hingga pada periode penelitian ini, maka dapat disimpulkan hipotesis

DAFTAR PUSTAKA

- 1] Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.
- 2] Mardiasmo. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2016.
- 3] Mulyadi, Endang. *Pengantar Ekonomi dan Bisnis Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen*, Jakarta: Yudhistira, 2013.
- 4] Pamungkas, Bagus Prasetya. “*Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*” Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Banten: 2016.
- 5] Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- 6] Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- 7] Siska “*Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Volton Indo Perkasa Tahun 2016*” Trisakti School Of Management. Jakarta: 2016.
- 8] Sucipto, Toto. *Pengantar Akuntansi dan Keuangan Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: Yudhistira, 2013.